

Makalah

EVALUASI DAN REVISI KURIKULUM JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN PROGRAM SARJANA (S1)

Makalah disajikan pada
Lokakarya Kurikulum Jurusan Ilmu Pemerintahan
FISIP UNPAD
Wisma Unpad, 23—24 Februari 2005

Oleh

Pipin Hanapiah, Drs.
NIP. 131832050



**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FISIP UNPAD**

**BANDUNG
2005**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, atas rahmat Tuhan Yang Mahaesa, makalah tentang **“Evaluasi dan Revisi Kurikulum Jurusan Ilmu Pemerintahan Program Sarjana (S1)”** telah selesai dikembangkan dan disusun kembali.

Makalah ini pernah disajikan pada *“Lokakarya Kurikulum Jurusan Ilmu Pemerintahan”* FISIP UNPAD pada tanggal 23—24 Februari 2005 di Wisma Unpad, Bandung. Makalah yang telah dikembangkan ini diajukan oleh penyusun untuk memenuhi kenaikan jabatan dan pangkat sebagai dosen pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran (FISIP UNPAD) yang setara dengan Golongan IV/b.

Demikian makalah ini ditulis dan semoga dapat memenuhi ajuan dimaksud.

Bandung, 2 April 2005

Penyusun,

Pipin Hanapiah, Drs.

NIP. 131832050

Makalah

**EVALUASI DAN REVISI
KURIKULUM JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
PROGRAM SARJANA (S1)**

Makalah disajikan pada
Lokakarya Kurikulum Jurusan Ilmu Pemerintahan
FISIP UNPAD
Wisma Unpad, 23—24 Februari 2005

Oleh

Pipin Hanapiah, Drs.
NIP. 131832050

Menyetujui:
Dosen Senior,

Dr. Samugyo Ibnu Redjo, Drs., M.A.
NIP. 131408365

DAFTAR ISI

Persetujuan Dosen Senior	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
A. Pendahuluan	1
B. Evaluasi	3
C. Revisi	5
D. Penutup	7
H. Daftar Pustaka	8

EVALUASI DAN REVISI
KURIKULUM JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
PROGRAM SARJANA (S1)*

Pipin Hanapiah**

A. Pendahuluan

1. Kurikulum Ilmu Pemerintahan—dalam konteks Lokakarya hari ini—perlu difokuskan pada orientasi pendidikan mahasiswa Program Sarjana Strata Satu (Program S1) yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan formal yang ilmiah dan universal di Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad untuk menghasilkan tamatan yang berkualifikasi sarjana. Perlu dipahami bahwa yang disebut sarjana itu adalah tamatan perguruan tinggi yang menguasai ilmu pengetahuan tertentu baik dalam hal teori maupun metodologinya.
2. Kurikulum Ilmu Pemerintahan menunjuk pada sistem paket pendidikan tinggi tentang pengetahuan-pemerintahan yang substansi pengajaran, penelitian, dan pengabdian-kepada-masyarakat yang diproses secara ilmiah.
3. Lembaga pendidikan formal ilmiah menunjuk pada program penyelenggaraan pendidikan yang terstruktur, terarah, dan terukur menurut kaidah-kaidah akademik dan memenuhi standar keilmuan.

* Disajikan pada ‘Lokakarya Kurikulum Jurusan Ilmu Pemerintahan’ FISIP Unpad, Wisma Unpad, 23—24 Februari 2005.

** Lektor Kepala dalam matakuliah ‘Metodologi Ilmu Politik/Pemerintahan’.

4. Lembaga pendidikan formal universal menunjuk pada program penyelenggaraan pendidikan yang *berstandar nasional dan internasional*, yaitu yang kurikulum, proses pembelajaran, *output* dan *outcome* tamatan, serta keberlanjutan jenjang/stratanya (ke tingkat Program S2 dan S3) dapat diakui dan diterima oleh universitas-universitas lainnya di negara mana pun.
5. Berkualifikasi-sarjana menunjuk pada tamatan perguruan tinggi yang *menguasai ilmu* (pemerintahan). Menguasai-ilmu (pemerintahan) menunjuk pada tamatan yang **mahir** dalam:
 - (1) berpikir rasional-sistematis;
 - (2) menggunakan metodologi-ilmu;
 - (3) melakukan penelitian-ilmiah; dan
 - (4) melakukan analisis-objektif.
6. Pengetahuan-pemerintahan perlu dikaji dengan *paradigma-baru*—yang berdimensi pada konsep-konsep pokok/utamanya berupa *regulasi-publik* (*public regulating*), *fasilitasi-publik* (*public facilitating*), dan *pelayanan-publik* (*public servicing*)—daripada dengan paradigma-lama—yang berdimensi pada perintah/komando, kuasa/kuasai, patuh/patuhi.
7. Diproses secara ilmiah (standar keilmuan) menunjuk pada *penciptaan budaya-akademik* pada Jurusan Ilmu Pemerintahan yang menekankan pada dimensi-dimensi terminologis (konsepsi), teoretis, analisis, dan metodologis dalam kegiatan-kegiatan perkuliahan, praktikum, penelitian/riset, diskusi/seminar/

sidang, penugasan, pengujian (quis, *review*, UTS, UAS, *takehome*, dll), dan sebagainya yang dikelola secara *berproses* (berlanjut, ajeg, mengembang, dan terkontrol).

8. Penciptaan budaya-akademik-secara-berproses menunjuk pada *komitmen* dan kebiasaan sivitas-akademika Jurusan Ilmu Pemerintahan untuk selalu saling berpikir, bersikap, berperilaku, dan berorientasi untuk terus-menerus mencerdaskan (pikiran), menghaluskan (kalbu), dan mensantunkan (karakter).

B. Evaluasi

1. **Kurikulum** Jurusan Ilmu Pemerintahan dari periode ke periode telah berkembang secara maju: dari yang bersubstansi pada *core* ‘politik-normatif-administratif’ (1974—1985), *core* ‘politik-pemerintahan-administratif’ (1986—1993), *core* ‘politik-pemerintahan’ (1994—2002), sampai *core* ‘politik-pemerintahan-kontemporer’ (2002—2007).
2. Pemilahan spesifikasi **praktikum** telah bergeser: dari spektrum/aspek ‘pemerintah(an) desa, pemerintah(an) propinsi/kabupaten/kota (daerah), dan pemerintah(an) nasional’ (1974—1998) ke spektrum/aspek ‘konsep pemerintahan, sistem pemerintahan daerah/desa, analisis pemerintahan, dan isu pemerintahan kontemporer’ (1999—2005).
3. **Isu/topik/judul skripsi** pernah berdinamika: dari variabel yang bersifat ‘longgar’(?) pada periode (1974—1999) dan (2003—sekarang) sampai pernah

diusahakan lebih ‘fokus’ pada periode (1999—2003). Yang dimaksud dengan ‘pernah diusahakan lebih fokus’ adalah sebagai berikut:

- (1) Bila monovariat, maka variabelnya harus tentang konsep yang tegas-tegas sebagai kajian pemerintahan;
 - (2) Bila bivariat, maka susunan variabelnya seperti:
 - (a) Vt dan Vb-nya berupa konsep-konsep pemerintahan (paling tepat);
 - (b) Vt-nya konsep pemerintahan, sementara Vb-nya bukan konsep pemerintahan (tepat);
 - (c) Vb-nya konsep pemerintahan, sementara Vt-nya bukan konsep pemerintahan (bisa tetapi kurang tepat);
 - (d) Vt dan Vb-nya bukan konsep pemerintahan (tidak bisa dan tidak tepat);
 - (3) Dan seterusnya untuk yang multivariat.
4. Mayoritas Mahasiswa dan Alumni Jurusan (Sarjana) Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad selama ini diduga masih lemah dalam **kemahiran** teoretik dan metodologis.
 5. Penguasaan **paradigma-baru** oleh para mahasiswa dan alumni, yang penulis tawarkan di sini, masih lemah dan ragu dibandingkan dengan penguasaan paradigma-lama..
 6. **Budaya-akademik** pada sivitas-akademika Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad masih terkesan formalitas dan belum-*berproses*.

C. Revisi

1. Untuk ke depan (mulai dari hasil Lokakarya ini) perlu:
 - (1) lebih mempertegas kurikulum Ilmu Pemerintahan pada substansi *core* ‘**pemerintahan**’;
 - (2) pemilahan spesifikasi **praktikum** yang lebih diarahkan pada spektrum/aspek pengenalan dan pelatihan ‘konsepsi (untuk Praktikum I), teoretik (untuk Praktikum II), metodologis (untuk Praktikum III), dan analisis (untuk Praktikum IV, yaitu berupa pepaduan konsepsi/teoretik dan metodologis untuk persiapan penulisan skripsi)’;
 - (3) pemokus-kembali **isu/topik/judul skripsi** pada kepastian variabel dan/atau konsep pemerintahan (seperti pada periode 1999—2003).
2. Untuk memenuhi **standar-nasional**, Kurikulum Jurusan Ilmu Pemerintahan perlu mengacu pada kurikulum nasional yang sedang berlaku(?).
3. Untuk memenuhi ‘**standar ilmiah** dan **universal**’, Kurikulum Jurusan Ilmu Pemerintahan perlu memperhatikan:
 - (1) Matakuliah-matakuliah pokok yang disajikan pada kajian Ilmu Pemerintahan pada universitas-universitas di banyak negara;
 - (2) Konsep-konsep, teori-teori, dan metodologi yang berkembang di banyak universitas ternama di tingkat nasional dan internasional;
 - (3) Referensi (*textbooks*) matakuliah-matakuliah yang semakin terbaru dan yang dikombinasikan dengan standar bahasa-baku tingkat internasional;

- (4) Evaluasi akademik melalui proses penugasan (tugas-tugas) dan pengujian (quis, *review*, UTS, UAS, *takehome*, dll) terhadap mahasiswa yang dikomparasikan dan dianalisis secara global, regional, nasional, lokal, dan komunitas.
4. Atas dasar butir-butir 1, 2, dan 3, Kurikulum Jurusan Ilmu Pemerintahan (Program S1) perlu **memuat matakuliah-matakuliah:**
- (1) **Kurnas**; dan
 - (2) **Kurlok Jurusan IP FISIP Unpad**, yang berupa:
 - (a) Matakuliah-matakuliah ‘standar internasional’ dari universitas-universitas luar negeri, seperti *Comparative Government*, *Comparative Local Government*, *Political Economy*, atau yang lainnya;
 - (b) Matakuliah-matakuliah ‘pengembang ber-nalar/pikir rasional-sistematis’, seperti Dasar-dasar Logika, Filsafat Ilmu, Filsafat Penelitian, dan Metodologi Ilmu;
 - (c) Matakuliah-matakuliah ‘pengimbang arus globalisasi’, seperti Bahasa Inggris (khusus untuk program *academic-purposes* dan *communication/correspondence*) dan Program SPSS (aplikasi komputer untuk keperluan penelitian sosial);
 - (d) Matakuliah-matakuliah ‘alat-bantu’, seperti Statistika Sosial, Metode Penelitian Sosial, Metode Penelitian Politik, Metode Penelitian Pemerintahan, Rencana Penelitian Pemerintahan;

- (e) Untuk matakuliah-matakuliah 'aktual' yang isu-isu, konsep-konsep, dan/atau teori-teori (pemerintahan)-nya masih bersifat kontemporer, cukup dibobot 0 (nol) atau paling banyak 1 (satu) SKS saja dan cukup dikaji melalui penyelenggaraan kuliah-umum (*studium generale*), seminar/diskusi, dan/atau tugas *review*-buku yang dilakukan baik secara rutin maupun insidental.
5. Kegiatan praktikum dan kuliah-umum bagi mahasiswa serta kegiatan penelitian dan kuliah-umum bagi dosen perlu diintegrasikan ke dalam dan/atau dikoordinasikan oleh **Laboratorium Pemerintahan**. Laboratorium ini pun perlu 'bermarkas' dan dijalankan di dalam Kampus FISIP Unpad, yang pengelolanya dipilih dan dibatasi-waktu 4 (empat) tahun sekali untuk paling lama 2 (dua) periode sesuai dengan periodisasi Pimpinan Jurusan yang sedang berlaku.
6. Dengan demikian, Kurikulum Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad akan mempunyai kekuatan *berproses* (berlanjut, ajeg, mengembang, dan terkontrol) tetapi juga *updated* (tidak lekas ketinggalan zaman). Di samping itu, para alumninya pun diharapkan akan semakin *berkualifikasi sarjana*.

D. Penutup

1. Kurikulum Jurusan Ilmu Pemerintahan sebaik apapun akan sangat bergantung efektivitasnya pada kualitas sumberdaya-dosen, ketersediaan anggaran, dan

faktor pendukung lainnya. Semoga dengan rencana Unpad memasuki BHPMN di tahun 2005 ini akan membuka jalan ke arah itu.

2. Sumbang-saran sederhana tetapi mudah-mudahan bermakna, melalui tulisan ini, penulis mengajak kolega/sivitas-akademika di Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad untuk mulai pada hari Rabu ini tanggal 23 Februari 2005 merintis penggunaan nama panggilan *dosen* (disingkat *dos*) di depan nama para dosen dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan kampus dan/atau dalam aktivitas akademik.

Contoh: “Apa kabar Dos?”;

“Selamat pagi Dos!”;

“Coba hubungi Dosen Ernan.” (mohon perkenan Pak Ernan);

... dan seterusnya.

E. Daftar Pustaka

- Blondel, J.**, 1995, *Comparative Government: An Introduction* (Second Ed.), PrenticeHall H.W.: London.
- Held, David**, 2004, *Democracy and the Global Order: From the Modern State to Cosmopolitan Governance*, Polity Press: U.K.
- Sedarmayanti**, 2003, *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik)*, Bagian Kedua, Bandung: Mandar Maju.
- Spiro, Herbert J.**, 1969, *Responsibility in Government: Theory and Practice (New Perspective in Political Science)*, Van Nostrand Reinhold Company: N.Y.
- Tjokroamidjojo, Bintoro**, 2000, *Good Governance: Paradigma Baru Manajemen Pembangunan*, Jakarta: UI Press.
- Setjen DPR-RI**, 2004. *istem Pendidikan Nasional*, Jakarta.
- Setjen MPR-RI**, 2002. *UUD 1945 dan Perubahannya*, Jakarta.

Surianingrat, Bayu, 1984. **Ilmu Pemerintahan (*Science of Government*)**, Bandung: t.p.

Widodo, Joko, 2001, ***Good Governance: Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah***, Surabaya: Insan Cendikia.

Vijayakusuma II/E-14, 21-02-05